

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Pada bagian tinjauan literatur ini, penulis akan memaparkan berbagai penelitian terdahulu serta landasan teoritis yang berkaitan erat dengan fokus penelitian. Tinjauan literatur berperan penting sebagai fondasi teoritis yang memperkuat kerangka penelitian ini. Melalui kajian literatur yang komprehensif, sehingga diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan perspektif yang lebih mendalam bagi pengembangan penelitian. Dalam proses analisis, penulis telah mengkaji beberapa karya ilmiah sebagai referensi dalam sumber kajian yang menjadi perbandingan. Adapun sumber-sumber yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Literatur **pertama** berjudul *“Femicide in Mexico: Who are the slain women according to news media? A quantitative study of social representations of victims and perpetrators”* yang ditulis oleh Maria Aldrete. Literatur ini membahas mengenai femisida yang terjadi di Meksiko dengan fokus pada bagaimana media menggambarkan korban dan juga pelaku. Femisida, sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrem, yang mana sudah menjadi isu yang mendesak di Meksiko, di mana angka dari kasus femisida sendiri sudah sangat tinggi. Pembahasan pada literatur ini, didasarkan pada pendeskripsian dan juga pemaparan terkait permasalahan femisida, dan juga terdapat penyediaan data untuk membandingkan pandangan sosial tentang kekerasan pasangan intim atau kerap disebut *Representations of Intimate Partner Violence (IPV)*. Penemuan dari literatur ini ialah, media sering kali menggunakan bahasa yang dilebih-lebihkan dalam pemberitaan femisida di Meksiko. Pada literatur ini, Aldrete menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis terkait konten berita dari tiga outlet media online terkemuka selama periode Juli 2014 hingga Desember 2017 yang merupakan masa kritis dari kekerasan terhadap perempuan di Meksiko (Aldrete, 2024).

Di dalam tulisannya, Aldrete tidak hanya menyoroti fenomena femisida

secara umum, tetapi juga mengungkapkan metode yang komprehensif atau mampu dilihat dari segala sisi untuk memahami bagaimana media membentuk narasi terkait kasus-kasus tersebut. Untuk mendalami analisisnya, dalam konteks metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konten kuantitatif dan analisis wacana kritis terhadap 2.527 artikel dari tiga outlet berita nasional yaitu, *El Universal*, *Excélsior*, dan *Reforma*. Di dalam literatur ini, Aldrete menggunakan teori Representasi Sosial sebagai kerangka analisis, sehingga penelitian ini mampu mengungkapkan bagaimana media tidak hanya sekedar melaporkan bagaimana peristiwa itu terjadi, melainkan juga turut berkontribusi dalam membentuk persepsi sosial yang memaklumi bagaimana kekerasan berbasis gender ini terjadi (Aldrete, 2024).

Hasil dari penelitian ini di anggap penting, mengingat bagaimana dampak dari media dalam membangun persepsi publik terkait kekerasan berbasis gender dan bagaimana persepsi ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap korban dan juga pelaku. Literatur ini menunjukkan bahwa media cenderung menciptakan persepsi negatif terhadap korban dibandingkan dengan pelaku. Aldrete menemukan bahwa, narasi yang dibangun oleh media sering kali berfokus pada karakteristik negatif korban seperti, perilaku atau bahkan latar belakang sosial (Aldrete, 2024).

Literatur ini memiliki persamaan dengan topik yang diambil oleh peneliti, yang mana memiliki fokus utama pada isu femisida di Meksiko, hal ini merupakan sebuah permasalahan yang kompleks atau dengan kata lain merupakan bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender. Di dalam literatur tersebut menyoroti peran dari media dalam membentuk persepsi sosial tentang femisida, sementara di dalam penelitian ini lebih terfokus kepada implementasi dari sebuah program yang bertujuan menurunkan angka kekerasan tersebut. Persamaan antara literatur dengan penelitian ini ialah prespektif kritis yang digunakan dalam mengeksplorasi upaya penanggulangan dan pemahaman terhadap fenomena femisida di negara tersebut (Aldrete, 2024).

Literatur **kedua** adalah “*Public Perceptions of Femicide and The Feministmovement in Mexico*”, yang ditulis oleh Sara J. Chaparro Rucobo dan

Apryl A. Alexander. Dalam mengeksplorasi fenomena femisida yang ada di Meksiko, literatur ini menggunakan multi-perspektif yaitu melalui persepsi publik, penggambaran media terkait isu ini, dan juga melalui pemahaman terkait dinamika gerakan feminis. Literatur ini mengungkapkan bahwa fenomena femisida yang terjadi di Meksiko, merupakan isu yang saling terkait, yang mana dipengaruhi oleh serangkaian faktor seperti, faktor sosial, kultural, dan juga struktural yang saling terikat. Di dalam tulisannya, Sara dan Apryl mengkritik bagaimana narasi yang digunakan media dalam membahas permasalahan femisida di Meksiko mampu membentuk persepsi publik, yang mana terkesan menggunakan bahasa yang menyalahkan korban sehingga mempengaruhi meningkatnya sikap menyalahkan korban di kalangan masyarakat (Chaparro Rucobo & Alexander, 2024). Menurut Sara dan Apryl, norma budaya yang mengakar dalam masyarakat Meksiko memberikan konteks mendalam terkait bagaimana femisida sendiri dipandang. Literatur ini juga mengungkapkan, bagaimana masyarakat Meksiko melihat femisida melalui pandangan terkait tradisi dan juga kehormatan, yang mana dapat memperkuat gagasan bahwa korban dengan cara tidak langsung bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Tidak hanya sampai disitu saja, literatur ini juga membahas mengenai kebangkitan gerakan feminis di Meksiko, yang mana hal ini merupakan sebagai bentuk protes yang menanggapi penanganan pemerintah yang tidak memadai atas kasus femisida di Meksiko. Bentuk dari protes ini disalurkan melalui kampanye media sosial, terutama pada tanggal-tanggal penting seperti peringatan Hari Perempuan Internasional. Maka dari itu, menurut Sara dan Apryl kebangkitan gerakan feminis yang terjadi di Meksiko ini, telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga sebagai simbol dari memperjuangkan keadilan (Rucobo & Alexander, 2024).

Literatur ini memiliki persamaan dengan topik yang diangkat oleh peneliti yaitu, kesamaan yang terletak pada pendekatan kritis dalam melihat isu femisida dalam konteks bagaimana keterkaitan antara femisida dengan tradisi dan juga kehormatan. Literatur ini menawarkan perspektif terkait konteks sosial dan budaya yang melatar belakangi perlunya tindakan sistematis, yang mana hal ini sejalan

dengan topik yang di angkat oleh peneliti yaitu, bagaimana Spotlight Initiative sebagai sebuah program atau sebagai bentuk tindakan yang diambil yang diharapkan mampu meminimalisir kasus femisida yang terjadi di Meksiko. Kesamaan lainnya ialah, menempatkan gerakan feminis dan respon publik sebagai elemen kunci dalam memahami perkembangan femisida (Rucobo & Alexander, 2024).

Literatur **ketiga** adalah “*Continuous Yet contentious: United Nations Agencies Roles and Mexico’s Adoption of Women’s Rights Protection Against Femicides (2018-2022)*”, yang ditulis oleh Witri Elvianti dan Nanda Satria. Penulisan dari literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mempromosikan perlindungan hak-hak perempuan dan menangani kekerasan berbasis gender di negara tersebut. Pembahasan pada literatur ini dimulai dengan menggambarkan bagaimana parahnya isu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi terus-menerus di Meksiko. Elvianti dan Satria menyoroti statistik yang mengkhawatirkan pada kasus ini dan juga latar belakang sosial-politik yang juga turut berkontribusi pada terjadinya femisida, contohnya ialah kartel narkoba dan juga ketidak setaraan gender yang sistematis. Literatur ini mencatat bahwa, Meksiko telah meratifikasi konvensi internasional yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan, hal ini juga lah yang menjadi dasar penelitian pada literatur ini yaitu tentang peran dari organisasi internasional dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan salah satu bentuknya ialah femisida yang terjadi di Meksiko (Elvianti & Satria, 2023).

Menurut Elvianti dan Satria, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam mendukung organisasi masyarakat sipil, melalui entitas-entitasnya seperti Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan juga UN Women. Literatur ini membahas bagaimana entitas-entitas ini menyediakan ruang pembelaan terhadap korban dan juga memfasilitasi tindakan bersama untuk menangani kekerasan berbasis gender. Mereka menekankan pentingnya mempertahankan standar moral internasional dalam membentuk kebijakan dan praktik nasional terkait hak-hak perempuan. Tidak hanya itu saja,

literatur ini juga secara kritis menilai dampak apa saja yang terjadi terhadap kebijakan hak-hak perempuan selama masa pemerintahan presiden Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Elvianti dan Satria menyatakan, meskipun ada beberapa kemajuan dalam perlindungan hak-hak perempuan, tantangan signifikan tetap ada terutama terkait dengan ada atau tidaknya kemauan dari pemerintah untuk secara efektif menangani femisida dan kekerasan berbasis gender (Elvianti & Satria, 2023).

Literatur ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu, meneliti upaya pembrantasan femisida di Meksiko melalui campur tangan organisasi internasional, khususnya entitas-entitas dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesamaan lainnya ialah sama-sama mengungkapkan bahwa femisida di Meksiko bukan sekedar masalah kriminal biasa, melainkan bentuk nyata dari struktur sosial yang diskriminatif. Kesamaan lainnya terdapat pada penyampaian terkait budaya patriarki, machismo, dan ketidak setaraan gender secara sistematis yang melumrahkan kekerasan terhadap perempuan di Meksiko. Namun juga, terdapat perbedaan antara literatur dengan peneliti yaitu terletak pada pendekatan yang diambil. Peneliti lebih berorientasi pada hambatan domestik dan juga evaluasi dari program Spotlight Initiative , sementara pada literatur lebih fokus pada dinamika hubungan antara organisasi internasional dan pemerintah Meksiko (Elvianti & Satria, 2023).

Literatur **keempat** berjudul “*Femicide in Mexico: Statistical Evidence of an Increasing Trend*”, yang ditulis oleh Eva Selene Hernández Gress dan bersama tim peneliti lainnya dari *Tecnologico de Monterrey dan Centro de Investigación y Docencia Económicas*. Literatur ini tidak hanya ingin mengetahui mengapa femisida di Meksiko meningkat lebih cepat dibandingkan kejahatan lainnya yang juga mengancam nyawa, tetapi juga berusaha mengidentifikasi negara bagian dengan tingkat kasus femisida tertinggi, serta memaparkan konsep yang bertujuan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam literatur ini memberikan landasan empiris yang kuat untuk memahami skala permasalahan femisida di Meksiko secara lebih akurat. Didalam literatur ini, Hernández mengambil data-data resmi yang bertujuan untuk dijadikan

bahan pembandingan antara jumlah kasus yang dilaporkan dengan peningkatan tren femisida yang terjadi di kehidupan selama periode penelitian, data tersebut berdasarkan data dari Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko atau *Secretaría de Seguridad Pública* yang mencakup 87 bulan data kriminal dari seluruh 32 negara bagian, mulai Januari 2016 hingga Maret 2022 (Hernández Gress et al., 2023).

Literatur ini juga berhasil mengidentifikasi *Estado de México*, *Ciudad de México*, dan *Veracruz* sebagai wilayah dengan tingkat femisida tertinggi, yang mana hal ini memberikan petunjuk ke mana arah dari segala upaya pencegahan femisida perlu difokuskan. Selain mengidentifikasi wilayah-wilayah kritis, penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor struktural yang menormalkan kekerasan berbasis gender ini. Literatur ini juga menemukan konteks sosial budaya Meksiko yang menjadi pemicu, salah satunya ialah budaya “*machismo*” yang sering dikaitkan dengan bagaimana masyarakat Meksiko menormalisasikan kekerasan berbasis gender (Hernández Gress et al., 2023).

Literatur ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama menemukan bahwa, femisida merupakan masalah sosial yang kompleks yang mana dikarenakan femisida sendiri berakar dari pada budaya patriarki dan *machismo* yang tertanam di Meksiko. Persamaan lainnya ialah, dalam meneliti kenaikan dari kasus femisida yang ada di Meksiko menggunakan data resmi berdasarkan Sekretariat Eksekutif Sistem Keamanan Publik Nasional Meksiko atau *Secretaría de Seguridad Pública* yang mencakup periode waktu yang serupa (2015-2022). Literatur ini dan topik yang diangkat peneliti sama-sama menyoroti urgensi penanganan femisida sebagai isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Namun, tentu saja terdapat perbedaan yang signifikan yaitu terletak pada fokus dari literatur dan peneliti. Literatur ini lebih memfokuskan penelitiannya pada kenaikan dari tren femisida dari tahun ketahun, sehingga dapat membuktikan bahwa permasalahan ini nyata dan membutuhkan tindakan segera. Sedangkan pada topik peneliti lebih terfokus kepada salah satu bentuk upaya pencegahan kenaikan tren atau bahkan penghapusan femisida yang ada di Meksiko melalui implementasi program internasional yaitu

Spotlight Initiative (Hernández Gress et al., 2023).

Literatur kelima berjudul *“Femicide and Gun Control: The Application of Symbolic Penal Law in The Mexican Criminalization of Femicide”*, yang ditulis oleh Lucas Martínez-Villalba, menghadirkan sebuah analisis mendalam tentang kriminalisasi femisida di Meksiko, yang melampaui pendekatan hukum konvensional dan menyajikan perspektif terkait peran hukum pidana dalam masyarakat. Literatur ini menyebutkan angka statistik yang mencapai peningkatan 375% pembunuhan perempuan menggunakan senjata api dalam dua dekade terakhir tidak sekedar menjadi data faktual, melainkan menjadi salah satu jalan untuk memahami kompleksitas struktural diskriminasi terhadap perempuan di Meksiko (Martínez-Villalba, 2024). Martinez tidak hanya melihat kepemilikan senjata sebagai suatu masalah yang biasa, tetapi mengaitkannya dengan bagaimana laki-laki kerap kali menunjukkan kekuatan mereka melalui kekerasan (Martínez-Villalba, 2024). Di dalam literatur ini, Martinez tidak hanya berhenti pada pengidentifikasian masalah, tetapi juga menawarkan kerangka kerja konkret untuk penanganan femisida. Martinez, di dalam tulisannya menekankan keseharusan pendekatan gender dalam suatu kebijakan yang dihasilkan negara, yang mana harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan kekerasan berbasis gender. Penggunaan teori kontrol sosial didalam literatur ini digunakan untuk berfokus pada, bagaimana masyarakat mengatur perilaku individu melalui norma dan hukum. Martinez berpendapat bahwa, meskipun hukum femisida diharapkan dapat mengurangi kekerasan, namun pada kenyataannya data menunjukkan bahwa angka femisida di Meksiko terus meningkat, yang mana hal ini menandakan kontrol sosial melalui hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ini (Martínez-Villalba, 2024).

Literatur ini memiliki persamaan dengan topik yang diangkat oleh peneliti yaitu, fokusnya kepada persoalan femisida yang mana sebagai bentuk pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh gender, yang mana isu ini merupakan suatu isu yang serius yang terjadi di Meksiko. Persamaan lainnya terletak pada, kesamaan dalam menyoroiti kasus-kasus ini yang dipicu oleh faktor sosial, budaya dan juga

lemahnya penegak hukum, serta tingginya pembebasan terhadap pelaku. Persamaan lainnya ialah terletak pada bagaimana literatur dan peneliti mengkritik bagaimana kebijakan pemerintah Meksiko dalam menangani femisida. Literatur ini menyoroti bahwa femisida tidak hanya terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh faktor struktural seperti budaya patriarki, dan juga pemerintah yang masih mempertahankan diskriminasi gender serta kekerasan berbasis gender yang sistematis. Sedangkan, perbedaan antara literatur dengan peneliti ialah terletak pada literatur ini lebih fokus kepada analisis hukum dan kebijakan terkait kriminalisasi femisida serta bagaimana hukum seringkali digunakan sebagai alat simbolis dari pada sebagai solusi yang dianggap efektif. Sedangkan peneliti menaruh fokus kepada implementasi dari program Spotlight Initiative dan juga menganalisis bagaimana program ini berusaha mengatasi hambatan kelembagaan, sosial, dan juga budaya yang sekiranya menghambat upaya pembrantasan femisida (Martínez-Villalba, 2024).

Literatur keenam berjudul “*An Interpretation of Femicide in Mexico: Violence and Human Rights*”, yang ditulis oleh Mariamne Crippa Méndez dan Adriana Rodríguez Barraza. Literatur ini mengkaji fenomena femisida di Meksiko melalui tiga proses utama yaitu, kekerasan, femisida, dan juga hak asasi manusia, dengan menggunakan teori kekerasan John Galtung sebagai kerangka analisisnya dan juga, dengan menggabungkan pemikiran dari Bourdieu, Segato, Lagarde, dan Russell untuk membuktikan bahwa femisida merupakan kekerasan struktural yang dilindungi oleh budaya dan juga struktur sosial. Literatur ini juga menyoroti peran negara yang dianggap gagal dalam melindungi hak asasi perempuan. Menurut Méndez dan Barraza, untuk mengatasi permasalahan femisida ini tidak cukup apabila hanya dengan kebijakan hukum yang lebih ketat, tetapi juga perlu adanya perubahan budaya atau prespektif yang mendalam (Crippa Méndez & Rodríguez Barraza, 2022).

Literatur ini memiliki persamaan dengan topik yang diangkat oleh peneliti yaitu, sama-sama menyoroti femisida memiliki dampak luas terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan kekerasan ini tidak hanya melukai individu, tetapi juga merusak

struktur sosial dengan menormalisasikan ketidakadilan dalam konteks kesetaraan gender dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Namun, tentu saja terdapat perbedaan yaitu, literatur ini membahas femisida dalam perspektif global dan juga historis lalu menghubungkannya dengan teori-teori kekerasan dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Literatur ini juga lebih menekankan pada perubahan struktural dan sosial untuk mengatasi femisida, seperti mengubah pola pikir masyarakat dan memperkuat kesadaran akan kekerasan berbasis gender. Sedangkan peneliti membahas femisida dalam konteks kebijakan internasional, dengan fokus pada bagaimana kerja sama antara Uni Eropa dan PBB yang meluncurkan program Spotlight Initiative yang diharapkan dapat mengurangi tren femisida di Meksiko (Crippa Méndez & Rodríguez Barraza, 2022).

Literatur **ketujuh** berjudul “*Actorness y efecto normativo de la Unión Europea a través de su política de desarrollo: la Iniciativa Spotlight implementada en México (2019-2020)*” atau “**Aktor dan Efek Normatif Uni Eropa Melalui Kebijakan Pembangunannya : Spotlight Initiative yang diterapkan di Meksiko (2019-2020)**”, yang ditulis oleh Enriqueta Serrano Caballero. Fokus utama pada literatur ini adalah menganalisis sejauh mana Uni Eropa (UE) memiliki pengaruh normatif (*normative power*) dan kapasitasnya sebagai aktor internasional (*actorness*) dalam kebijakan pengembangan dan kerja sama internasional, khususnya dalam menangani femisida. Spotlight Initiative, sebuah program kolaborasi antara UE dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Literatur ini menganalisis peran Uni Eropa sebagai aktor pembangun melalui tiga kriteria utama yaitu peluang, kehadiran, dan kapasitas (Serrano Caballero, 2022).

Literatur ini menjelaskan bagaimana Spotlight Initiative memungkinkan UE untuk memasukkan nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia ke dalam kebijakan nasional yang ada di Meksiko, yang mana hal ini dibuktikan dengan program ini dapat membantu reformasi hukum Meksiko, salah satunya ialah revisi *Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia* (LGAMVLV) atau Undang-Undang Akses Perempuan pada Kehidupan Bebas Kekerasan.

Undang-undang tersebut kini mencakup konsep-konsep progresif seperti interseksionalitas atau konsep yang menggambarkan bagaimana berbagai identitas sosial saling berkaitan dan mempengaruhi, pendekatan diferensial atau penyesuaian terhadap nilai, dan definisi kekerasan berbasis gender yang lebih komprehensif. Namun, literatur ini juga menyoroti bahwa membentuk kebijakan saja tidak cukup untuk menangani femisida, hal ini dikarenakan tantangan dalam implementasi, kurangnya sumber daya, dan hambatan struktural tetap menjadi masalah utama dalam memastikan bahwa kebijakan ini sekiranya berdampak nyata atau tidak bagi perempuan Meksiko (Serrano Caballero, 2022).

Literatur ini memiliki persamaan dan juga perbedaan yang cukup signifikan dengan peneliti. Literatur ini menggunakan konsep *actorness* dan juga kekuatan normatif Uni Eropa atau lebih mengarah kepada bagaimana Uni Eropa Mengekspor nilai dan prinsipnya melalui Spotlight Initiative . Literatur ini juga berfokus kepada pengimplementasian fase pertama dari program Spotlight Initiative (2019-2020) dan lebih banyak membahas pengaruh Uni Eropa sebagai aktor global yang berusaha mengimplementasikan nilai-nilai normatifnya di Meksiko. Sedangkan peneliti menggunakan teori liberalisme institusional dan tata kelola global untuk menyoroti bagaimana kerjasama internasional dalam program ini beroperasi. Peneliti juga memfokuskan penelitiannya pada penerapan fase kedua (2022-2023) dari Spotlight Initiative , dan juga membandingkannya dengan fase pertama dari program tersebut (2019-2021) sehingga nantinya dapat menyimpulkan apakah terjadi perbaikan dalam efektivitasnya atau tidak. Tidak hanya itu saja, peneliti menyoroti berbagai aktor, termasuk pemerintah Meksiko, organisasi masyarakat sipil, dan juga lembaga internasional yang terlibat dalam penerapan Spotlight Initiative ini (Serrano Caballero, 2022).

Literatur **kedelapan** berjudul **“Peran National Central Bureau (NCB)-Interpol Indonesia dalam Penanganan Cybercrime (Romance Scam) tahun 2018-2021”**, yang di tulis oleh Fredericko Constantijn Yossia Yerronio Pangalila, Christian Herman Johan de Fretes, Roberto Octovianus Cornelis Seba. Literatur ini memfokuskan penelitiannya pada priode 2018-2021, di mana pada rentan tahun ini

merupakan masa pandemi COVID-19 secara signifikan meningkatkan aktivitas online masyarakat. Literatur ini mengungkapkan *romance scam* merupakan suatu strategi penipuan canggih yang memanfaatkan kerentangan psikologis korban. Pelaku menggunakan platform media sosial dan aplikasi kencan untuk membangun hubungan palsu, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi finansial dan traumatisasi psikologis bagi korban. Laporan dari Komunitas Waspada Scammer Cinta (WSC) tahun 2018-2021 mencatat 429 korban dengan total kerugian mencapai 24 miliar rupiah (Pangalila et al., 2023).

Hasil analisis dari literatur ini mengungkapkan kontribusi penting dari kolaborasi internasional dalam mengatasi kejahatan *cyber*. Signifikansi yang ada didalam literatur ini terletak pada pemahamannya bahwa dalam era digital, kejahatan tidak lagi dibatasi oleh geografis. Institusi seperti Interpol tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, melainkan juga sebagai fasilitator keamanan global yang menghubungkan kepentingan berbagai negara. Dampak nyata terlihat pada penurunan jumlah korban *romance scam* pada tahun 2021, yang mana membuktikan efektivitas pendekatan kolaboratif yang dibangun (Pangalila et al., 2023).

Sebagai landasan teoritis yang memperkuat analisis fenomena *romance scam*, didalam literatur ini para peneliti menggunakan kerangka pemikiran yang relevan dengan dinamika hubungan antar negara. Liberalisme institusional menjadi instrumen analitis kunci dalam literatur ini, yang mana memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana organisasi internasional berperan dalam mengatasi kejahatan lintas batas, khususnya *cybercrime*. Teori ini memandang institusi internasional sebagai badan hukum aktif yang tidak sekadar menjembatani kepentingan negara, melainkan mampu membentuk ulang dinamika hubungan internasional. Dalam konteks penanganan *romance scam*, ICPO-Interpol bukan sekadar wadah koordinasi, aktor yang mentransformasi cara negara merespons ancaman digital. Penggunaan teori liberalisme institusional dalam literatur ini dapat menjelaskan bahwa kejahatan cyber seperti *romance scam* memperlihatkan mustahilnya satu negara bertindak secara independen (Pangalila et al., 2023).

Dalam konteks teoritis, literatur ini memiliki kesamaan dengan teori yang digunakan dalam topik peneliti, yaitu dalam penggunaan teori Liberalisme Institusional sebagai kerangka analisis utama. Didalam literatur, teori liberalisme institusional digunakan untuk menjelaskan bagaimana NCB-interpol Indonesia bekerja dalam sistem Interpol, yang merupakan organisasi internasional yang sekiranya memungkinkan pertukaran informasi dan kerja sama lintas negara dalam memberantas kejahatan *cyber*, termasuk *romance scam*. Tidak hanya itu saja, mekanisme kerjasama internasional dalam literatur ini terjadi dalam bentuk pertukaran informasi antara NCB-Interpol Indonesia dengan Interpol Global (Pangalila et al., 2023). Sedangkan penggunaan teori liberalisme institusional dalam topik peneliti digunakan untuk memahami bagaimana Uni Eropa dan PBB melalui program Spotlight Initiative bekerja sama dengan pemerintah Meksiko dalam merancang kebijakan dan reformasi hukum guna menekan angka femisida sekaligus mengubah norma sosial terkait kekerasan berbasis gender. Tidak hanya itu saja, mekanisme kerja sama internasional diwujudkan dalam bentuk alokasi dana, pelatihan, reformasi hukum, dan penguatan kapasitas kelembagaan melalui Spotlight Initiative untuk menangani femisida di Meksiko (Pangalila et al., 2023).

Literatur **kesembilan** berjudul **“Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kenya oleh UN Women pada Tahun 2020-2022”**, yang ditulis oleh Nurul Azizah Salma dan Renitha Dwi Hapsari. Literatur ini menyajikan analisis mendalam mengenai peran UN Women dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kenya selama periode 2020-2022. Literatur ini hadir pada konteks yang genting, yakni saat pandemi COVID-19 yang memicu peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender secara global, dengan Kenya mencatat angka tertinggi yakni 80% sejak dimulainya pandemi pada Maret 2020 (Salma & Hapsari, 2023). Literatur ini secara eksplisit mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan yang terkait dengan perbedaan jenis kelamin yang berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental bagi perempuan, termasuk dalam bentuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan, baik di ruang publik maupun privat. Definisi ini juga, mengacu pada

referensi dari OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) (Salma & Hapsari, 2023).

Literatur ini menekankan aspek penting yang menjadi latar belakang dari penelitian ini ialah, hubungan antara pandemi COVID-19 dengan peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan. Literatur ini juga menjelaskan faktor-faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan, yaitu mencakup konsumsi alkohol, tingkat pendidikan rendah, masalah kesehatan mental, serta ketidaksetaraan gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarki dan dominasi maskulinitas. Sehingga, literatur ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan faktor pemicu tambahan dari kekerasan tersebut yang mana meliputi kebijakan lockdown, himbuan untuk tinggal di rumah, situasi ekonomi sulit, dan keterbatasan terhadap ketersediaan pangan (Salma & Hapsari, 2023).

Kerangka teoretis yang digunakan dalam jurnal ini didasarkan pada teori peran organisasi internasional dari Kelly-Kate S. Paes. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah tata kelola global, namun analisis yang dilakukan sebenarnya mencerminkan aspek-aspek penting dalam tata kelola global, khususnya dalam penanganan isu-isu transnasional seperti kekerasan terhadap perempuan (Salma & Hapsari, 2023). Dari lima peran organisasi internasional yang diidentifikasi Paes, penelitian ini memfokuskan analisisnya pada tiga peran yang dinilai relevan dengan kasus kekerasan berbasis gender: *Problem Solver*, *Capacity Builder*, dan *Aid Provider*. Dalam kapasitasnya sebagai *Capacity Builder*, UN Women menjalankan kampanye "*16 Days of Activism against Gender Based-Violence Against Women & Girls*" dan melakukan advokasi kepada para pemimpin adat Afrika (Salma & Hapsari, 2023). Upaya ini mencerminkan proses penyebaran norma internasional ke tingkat lokal, di mana nilai-nilai kesetaraan gender dan penghapusan praktik-praktik berbahaya, contohnya seperti mutilasi alat kelamin perempuan dipromosikan. Proses ini merupakan elemen penting dalam tata kelola global, di mana aktor internasional berupaya memengaruhi perubahan normatif di tingkat lokal (Salma & Hapsari, 2023).

Dalam konteks teoritis, literatur ini memiliki kesamaan dengan teori yang

digunakan dalam topik peneliti, yaitu dalam penggunaan konsep tata kelola global atau *global governance* untuk memahami bagaimana norma internasional diterapkan dalam cakupan kebijakan domestik. Didalam literatur ini, UN Women dianggap sebagai aktor global yang menginisiasi berbagai program untuk menangani kekerasan berbasis gender di Kenya, dengan menanamkan norma kesetaraan gender dan hak asasi perempuan melalui advokasi, kampanye, dan penyediaan layanan bagi korban kekerasan. UN Women menerapkan norma hak asasi perempuan, contohnya dalam bentuk kampanye seperti *16 Days of Activism* dan juga advokasi kepada pemimpin adat untuk menghapus praktik mutilasi genital perempuan atau FGM di Kenya (Salma & Hapsari, 2023). Sedangkan penggunaan teori tata kelola global (*Global Governance*) dalam topik peneliti ialah peran dari Spotlight Initiative sebagai instrumen *global governance* dalam mempromosikan norma anti-femisida di Meksiko, melalui reformasi hukum dan kebijakan yang bertujuan mengurangi angka pembunuhan berbasis gender. Tidak hanya itu saja, Spotlight Initiative menggunakan pendekatan normatif untuk mendorong reformasi hukum di Meksiko, dengan menyesuaikan sistem hukum nasional agar lebih sejalan dengan norma internasional tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Persamaan inilah, yang membuktikan tata kelola global atau *global governance* menekankan bahwa aktor-aktor internasional, seperti organisasi global dan supranasional, memiliki peran dalam membentuk dan mengimplementasikan norma-norma internasional di tingkat nasional (Salma & Hapsari, 2023).

Literatur **kesepuluh** berjudul “**Upaya Memulihkan Hak-Hak Perempuan: FIAP Kanada dalam Upaya Penurunan Gender Based Violence di Afghanistan**”, yang ditulis oleh Kanya Sepasthika Ramadhani dan Marten Hanura. Literatur ini menghadirkan analisis komprehensif tentang bagaimana kebijakan luar negeri Kanada melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) berkontribusi dalam upaya mengurangi kekerasan berbasis gender (*Gender-Based Violence/GBV*) di Afghanistan. Literatur ini hadir pada saat yang sangat tepat, mengingat tingginya angka diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan yang terus menjadi perhatian komunitas internasional. Latar belakang

dari literatur ini dimulai dengan penjelasan mendalam mengenai situasi diskriminasi perempuan di Afghanistan yang telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan pada 1996 (Ramadhani & Hanura, 2023).

Setelah mengidentifikasi akar permasalahan diskriminasi gender dalam konteks budaya lokal, literatur ini juga secara efektif menggambarkan upaya pemerintah demokratis Afghanistan untuk mengembalikan hak-hak perempuan sebagai bagian dari proses perdamaian, termasuk ratifikasi CEDAW pada 2003. Namun, literatur ini juga secara kritis menunjukkan kesulitan implementasi yang dihadapi. Data dari Amnesty Internasional yang menunjukkan tingginya angka buta huruf (87%), pernikahan paksa (70-80%), dan pernikahan anak di bawah 16 tahun di kalangan perempuan Afghanistan memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi. Predikat Afghanistan sebagai "*The Worst Places in the World for Women*" pada 2011 semakin memperkuat urgensi permasalahan ini (Ramadhani & Hanura, 2023). Selanjutnya, literatur ini membahas mengenai era Kanada di Afghanistan, dimulai dari keterlibatan militer bersama NATO pasca serangan 11 September 2001, hingga perubahan kebijakan luar negeri di bawah pemerintahan Justin Trudeau yang mengusung nilai-nilai feminisme melalui *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Transisi ini dijelaskan secara berkaitan, menunjukkan pergeseran pendekatan Kanada dari keterlibatan militer ke bantuan pembangunan berbasis gender. Secara keseluruhan, latar belakang literatur ini berhasil membangun pemahaman komprehensif tentang urgensi masalah kekerasan berbasis gender di Afghanistan dan relevansi kebijakan luar negeri Kanada dalam menanganinya (Ramadhani & Hanura, 2023).

Untuk memahami dinamika kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan dan efektivitas intervensi internasional, literatur ini menggunakan konsep Gender-Based Violence (GBV) atau Kekerasan Berbasis Gender menjadi salah satu kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji efektivitas *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) Kanada di Afghanistan (Ramadhani & Hanura, 2023). Literatur ini tidak hanya mendefinisikan GBV sebagai tindak kekerasan biasa, tetapi menguraikannya sebagai konsep yang menggambarkan tindakan yang mencakup

kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi yang dialami perempuan Afghanistan, yang berakar pada ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa yang timpang. Literatur ini juga mengontekskan GBV dalam situasi spesifik Afghanistan, di mana praktik-praktik seperti pernikahan paksa, pernikahan anak, kekerasan domestik, dan pembatasan mobilitas perempuan dipandang sebagai manifestasi GBV yang didasari oleh interpretasi budaya dan agama tertentu (Ramadhani & Hanura, 2023).

Terdapat kesamaan dalam penggunaan konsep *Gender-Based Violence* atau Kekerasan Berbasis Gender terhadap literatur ini dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Kesamaan-kesamaan tersebut berupa pengakuan terkait GBV merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi perempuan, yang tidak hanya berakar pada ketimpangan gender, tetapi juga diperkuat oleh sistem sosial dan budaya patriarki. Tidakhanya itu saja, kesamaan lainnya ialah sama-sama menyoroti bahwa norma sosial dan budaya patriarki memainkan peran utama dalam keberlanjutan dari GBV atau kekerasan berbasis gender ini. Yang mana, hal ini menandakan pemberantasan GBV tidak hanya membutuhkan perubahan hukum, tetapi juga perubahan sosial dan budaya (Ramadhani & Hanura, 2023).